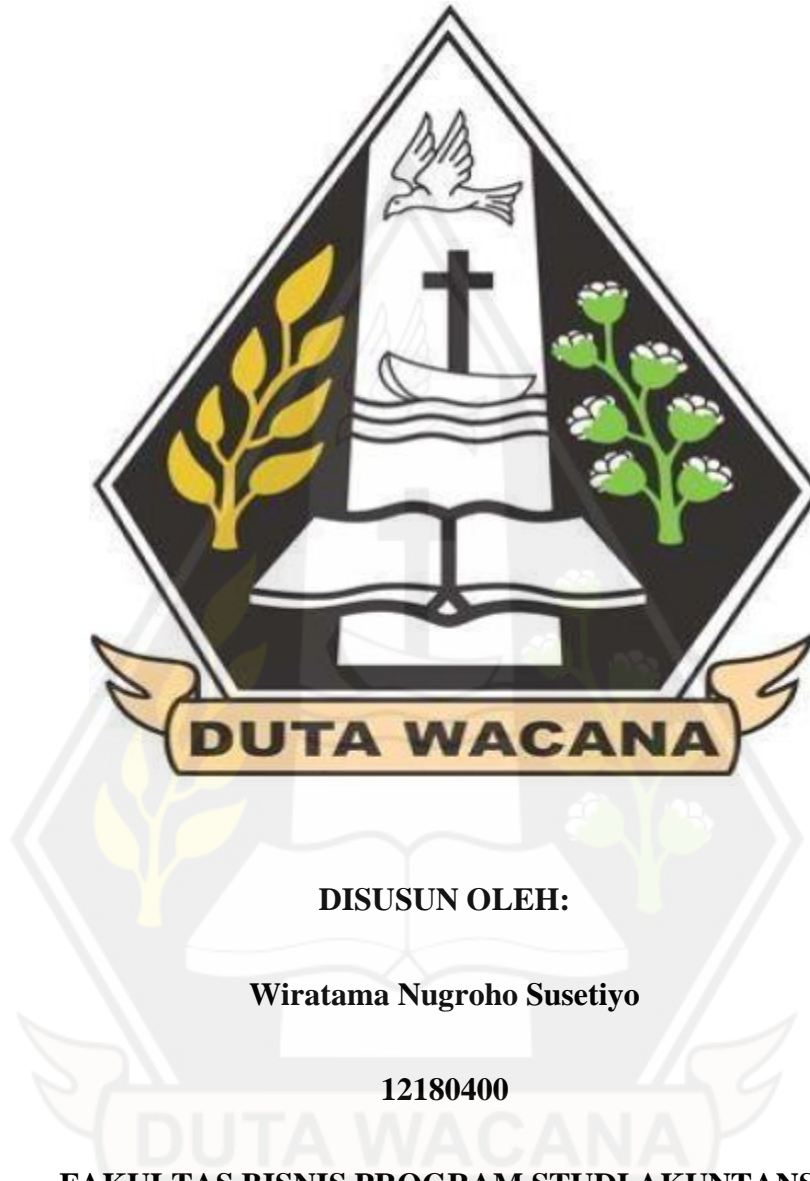


**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA**

**MAKASSAR PERIODE 2017-2021**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**Wiratama Nugroho Susetiyo**

**12180400**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

**Disusun oleh:**

**WIRATAMA NUGROHO SUSETIYO**

**12180400**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiratama Nugroho Susetiyo  
NIM : 12180400  
Program studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi (tulis salah satu)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**“ANALISIS KINERJA KUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2017-2021”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta  
Pada Tanggal : 25 Januari 2020

Yang menyatakan

  
Wiratama Nugroho Susetiyo  
12180400

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2017-2021”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**WIRATAMA NUGROHO SUSETIYO**

12180400

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Akuntansi pada tanggal 10 Januari 2023

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Astuti Yuli Setyani, SE, M.Si., Ak., CA  
(Ketua Tim Penguji)
2. Dra. Putriana Kristanti, MM., Ak., CA  
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M. Si  
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 20 Januari 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Ketua Program Studi Akuntansi



Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA. CMA.,CPA.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS KINERJA KEUNAGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  
MAKASSAR PERIODE 2017-2021"**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi mana pun, Kecuali bagian dari sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil dari plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 20 Desember 2022



**WIRATAMA NUGROHO SUSETIYO**

**12180400**

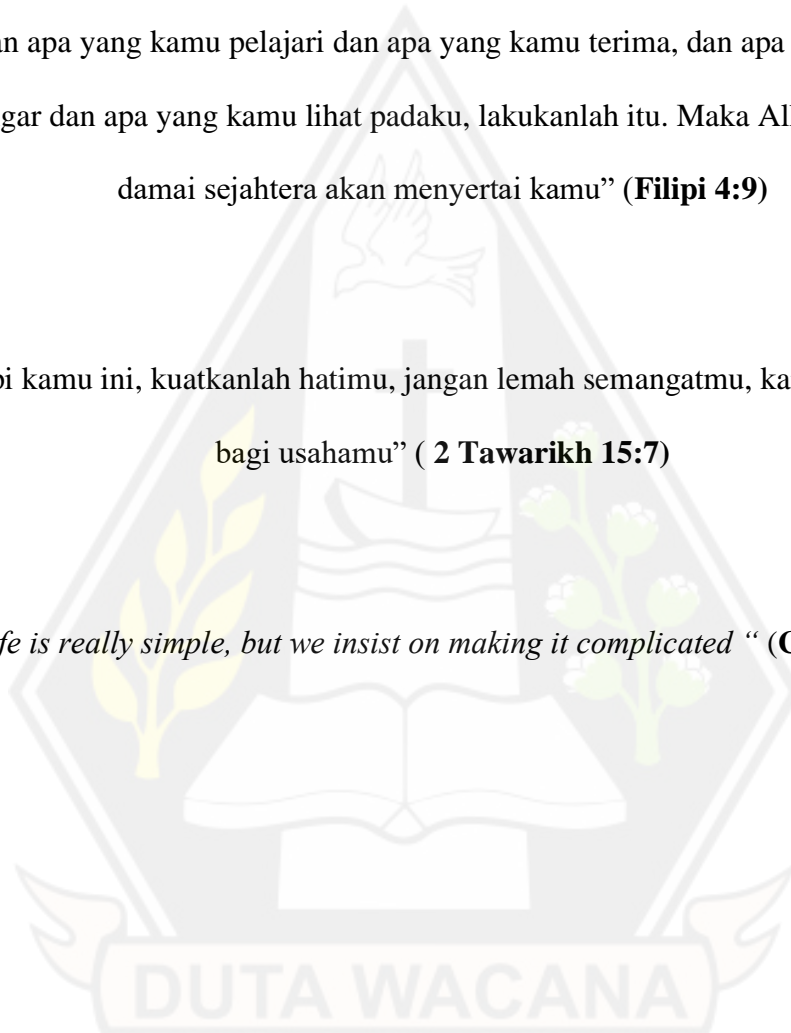
## HALAMAN MOTTO

“Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah” (**Amsal 9:9**)

“Dan apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu terima, dan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu” (**Filipi 4:9**)

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu” (**2 Tawarikh 15:7**)

“ *life is really simple, but we insist on making it complicated* “ (**Confucius**)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, masukan, saran dan semangat yang telah penulis dapat selama ini yang telah diberikan oleh:

1. Tuhan Yesus Kristus atas rahmat, penyertaan dan kasih sayang-Nya kepada penulis dari mulainya perkuliahan hingga pada akhirnya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga yang sangat dicintai penulis yaitu papa, mama dan adik penulis, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa dan motivasi serta dukungan yang lain sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Diri saya sendiri yang telah bertahan sampai sejauh ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana atas segala bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan
6. Seluruh Dosen penguji Skripsi.
7. Sahabat penulis yaitu Claudio Josua Lumbantobing, Glen Thomas Walangitan, S.H, Yohana Rafaelita Sekar Arum, Mario Gusti Arya, twing-twing (Kelvin, Rini, Siska, April, Lina, Eu, Lini, Alni) dan Fili

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata 1 (S1) jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si, selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Yogyakarta, 20 Desember 2022



Wiratama Nugroho Susetiyo



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kontribusi Penelitian .....	5
1.5 Batasan Penelitian .....	6
BAB II .....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) .....	7
2.1.2 Otonomi Daerah .....	8
2.1.3 Keuangan Daerah .....	11
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	11
2.1.5 Pendapatan Daerah .....	12
2.1.6 Kinerja Keuangan Daerah .....	14
2.1.7 Analisis SWOT .....	17
2.2 Penelitian Terdahulu .....	18

<b>BAB III</b> .....	24
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	24
<b>3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data</b> .....	24
<b>3.2 Langkah-langkah Penelitian</b> .....	25
<b>3.2.1 Teknik Analisis Data</b> .....	25
<b>3.3 Gambaran Umum Daerah</b> .....	28
<b>BAB IV</b> .....	32
<b>ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	32
<b>4.1 Analisis Hasil</b> .....	32
<b>4.1.1 Rasio Kemandirian</b> .....	33
<b>4.1.2 Rasio Efektivitas</b> .....	34
<b>4.1.3 Rasio Efisiensi</b> .....	35
<b>4.1.4 Rasio Keserasian</b> .....	36
<b>4.1.5 Rasio Derajat Desentralisasi</b> .....	38
<b>4.1.6 Rasio Pertumbuhan</b> .....	39
<b>4.2 Pembahasan</b> .....	40
<b>4.3 Analisis SWOT</b> .....	42
<b>BAB V</b> .....	44
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	44
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	47
<b>LAMPIRAN</b> .....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1. 1.....	26
Tabel 3.2.1. 2.....	26
Tabel 3.2.1. 3.....	27
Tabel 3.2.1. 4.....	28
Tabel 4.1.1.....	33
Tabel 4.1.2.....	34
Tabel 4.1. 3.....	36
Tabel 4.1.4.....	37
Tabel 4.1. 5.....	37
Tabel 4.1. 6.....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 PETA KOTA MAKASSAR .....29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Makassar periode 2017.....	49
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Makassar Periode 2018 .....	51
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Makassar Tahun 2019 .....	53
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kota Makassar Tahun 2020 .....	55
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Kota Makassar Tahun 2021 .....	57
Lampiran 6 Hasil Pengolahan Data.....	60
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian .....	63
Lampiran 8 Halaman Persetujuan .....	65
Lampiran 9 Kartu Konsul.....	66
Lampiran 10 Lembar Revisi .....	68
Lampiran 11 Lembar Revisi Judul.....	69



**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**KOTA MAKASSAR PERIODE 2017-2021”**

**Wiratama Nugroho Susetiyo**

**12180400**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Kristen Duta Wacana**

**Email: [wiratama.susetiyo@students.ukdw.ac.id](mailto:wiratama.susetiyo@students.ukdw.ac.id)**

**ABSTRAK**

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Makassar dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja modal, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data pagu/ laporan realisasi anggaran Kota Makassar Periode 2017-202. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa kota Makassar sudah efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan daerahnya dan sudah mampu menjalankan sendiri otonominya namun. Alokasi belanja operasi dan belanja modal yang sudah baik, dalam hal pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahun namun, dilihat dari rasio derajat desentralisasi, kewenangan belum sepenuhnya diberikan kepada pemerintah kota Makassar.

**Kata Kunci:** *Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kinerja Keuangan Daerah.*

**“ANALYSIS OF REGIONAL GOVERMENT FINANSIAL PERFORMANCE  
IN MAKASSAR FOR THE 2017-2021 PERIOD”**

**Wiratama Nugroho Susetiyo**

**12180400**

***Accounting Studies Program Faculty Of Bussiness***

***Duta Wacana Christian University***

**Email: [wiratama.susetiyo@students.ukdw.ac.id](mailto:wiratama.susetiyo@students.ukdw.ac.id)**

**ABSTRACT**

*Regional financial performance is the ability of a region to manage its regional income in the context of service to the community and regional development. The purpose of this research is to find out and analyze the financial performance of the regional government of Makassar City in terms of the ratio of independence, the ratio of effectiveness, the ratio of efficiency, the ratio of capital expenditure, the ratio of the degree of decentralization, and the ratio of growth in the Regional Original Income. This study uses secondary data, namely ceiling data/reports on the realization of the Makassar City budget for the 2017-2020 period. The results of testing the data show that the city of Makassar has been effective and efficient in managing its regional income and has been able to carry out its autonomy. The allocation of operating expenditures and capital expenditures has been good, in terms of growth of Regional Original Revenues it has increased and decreased every year but, judging from the ratio of the degree of decentralization, the authority has not been fully given to the Makassar city government.*

*Keywords: Financial Performance, Regional Financial Performance Ratio, Regional Original Revenue,.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah negara yang terdiri dari banyak pulau serta negara dengan kepadatan penduduk paling banyak keempat di dunia. Indonesia sangat membutuhkan pembangunan dikarenakan banyaknya penduduk dari Sabang sampai Merauke maka, di setiap daerah pembangunan harus sama rata agar tidak terjadi kesenjangan dan persaingan antar daerah. Pembangunan suatu daerah tidak hanya berupa sarana dan prasarana tetapi termasuk rumah tangga pemerintahan dan roda ekonomi di dalam daerah tersebut. Pembangunan dan pemerataan pada setiap daerah dilaksanakan atas wewenang yang cukup yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Indonesia menyelenggarakan urusan pemerintah menganut 3 asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 8, menetapkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. asas desentralisasi membagi pemerintahan menjadi 2 tingkat yaitu pemerintahan daerah besar dan pemerintahan daerah kecil yang daerah otonomnya meliputi tingkat 1 yaitu provinsi dan tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus dan menjalankan rumah tangga daerahnya masing-masing.



UU No. 23 tahun 2014, pasal 1 ayat 9, menjelaskan bahwa “dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/ atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai tanggung jawab urusan pemerintahan umum”.

Tugas pembantuan merupakan gambaran sistem dan prosedur dalam pemberian wewenang pemerintahan kepada daerah dari pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan pemerintahan dan dalam ada kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas

Setiap daerah memiliki pembagian daerah administrasi yang menuntut untuk adanya sistem keuangan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kelancaran dalam menjalankan pemerintahan. pemerintah harus mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan menyediakan barang publik dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat membantu kegiatan pembangunan daerah. Pembagian tugas dalam mempersiapkan barang publik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan menimbulkan konsekuensi dalam perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kebanyakan negara berkembang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi yang artinya pemerintah pusat banyak memiliki dana dalam menyediakan barang publik (Suparmoko, 2002).

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 3, menjelaskan mengenai “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem yang

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan dasar serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”. Pasal 1 ayat 19, menetapkan bahwa “Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi”.

Pemerintah daerah memerlukan dana untuk menjalankan pemerintahannya. Dana tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah (Hamsiah, 2019). Penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah meliputi ganjaran (jumlah uang yang diberikan pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan), subsidi (jumlah uang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melebihi kekuatan daerah itu sendiri dan pembiayaan dalam hal perbaikan yang tidak dapat ditanggung oleh daerah itu sendiri dan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan rumah tangga daerah itu) dan sumbangan (dana ditujukan kepada pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan sehingga daerah tersebut dapat menghadapi permasalahan dalam anggaran dan pendapatan). Pemerintah daerah juga menerima keuangan yang bersumber dari pinjaman yaitu pinjaman dari bank, pinjaman berupa obligasi dan luar negeri (dengan persetujuan pemerintah pusat), pinjaman dari pemerintah pusat dan pinjaman lain-lain.

UU No. 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2, menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah yang mengatur roda perekonomian daerah pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakat agar di dalam sistem pemerintahan yang diatur dapat terbentuk pemerintahan yang baik dan bersih. Di zaman sekarang ini pemerintah daerah memiliki otoritasnya dalam mengatur daerah dan rumah tangga keuangan masing-masing. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban setiap daerah. Hak dari setiap daerah untuk mencari pendapatan dari pemungutan pajak daerah, retribusi maupun sumber penerimaan lainnya berdasarkan per undang undangan yang berlaku sedangkan kewajiban daerah yaitu menggunakan uang yang telah dikumpulkan dalam rangka melakukan dan melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan di daerah.

Makassar merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi yang dapat disamakan dengan kota besar seperti DKI Jakarta, medan dan kota Surabaya. Dengan tingkat ekonomi yang tinggi, Makassar dapat membangun usaha-usaha dan Potensi yang dimiliki oleh kota Makassar juga sangat banyak baik dari sektor jasa maupun sektor barang dagang yang dapat meningkatkan perekonomian kota Makassar maupun perekonomian Indonesia.

Menurut Saragih & Siregar (2020) Daerah yang dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan akan menjadi pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi APBD, semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin kecil suatu daerah bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. Tingginya pembangunan daerah dapat menjadi gambaran bahwa dampak yang akan

diterima oleh masyarakat di daerah tersebut akan baik dan berdampak juga dengan kinerja daerah tersebut. Cara yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu Rasio kinerja keuangan daerah meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan PAD. Suatu daerah dikatakan berhasil dalam menjalankan kebijakan daerah otonomnya dapat dilihat melalui kinerja keuangan daerah tersebut. Dengan demikian penulis ingin menulis dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Periode 2017-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan PAD

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan PAD.

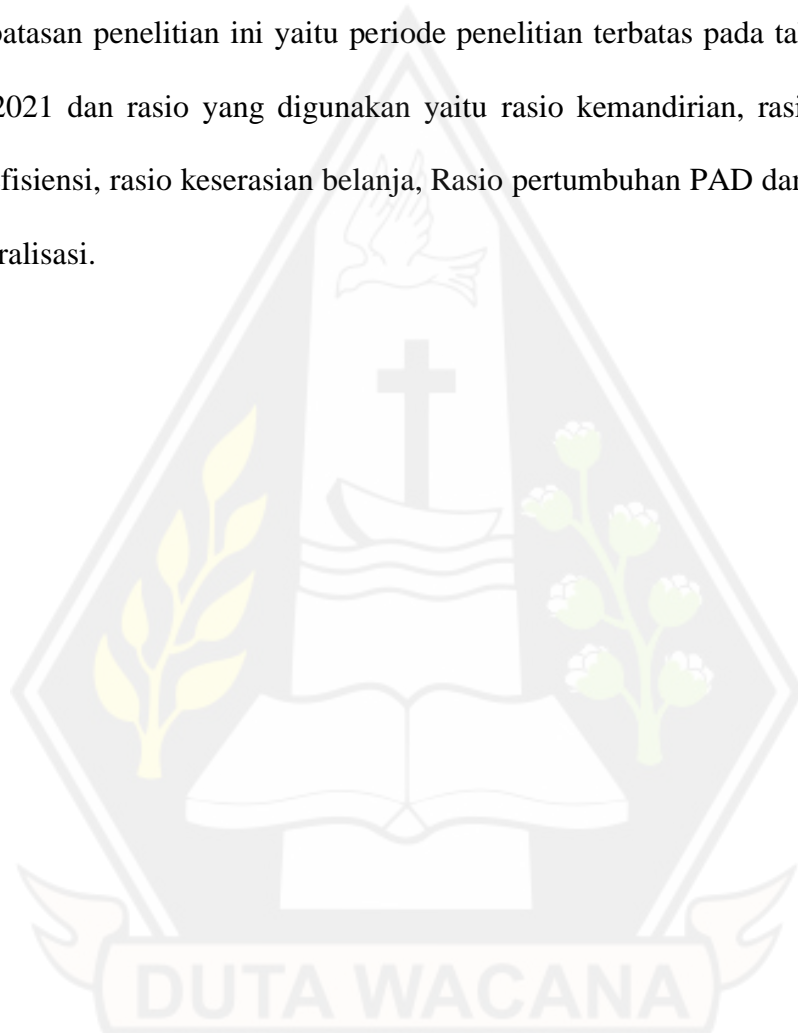
## **1.4 Kontribusi Penelitian**

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah informasi, pengetahuan, referensi serta saran dan masukan tentang bagaimana kinerja keuangan kota Makassar dan pengaruh kinerja keuangan Kota Makassar sehingga dapat memajukan kota Makassar menjadi lebih baik.

Manfaat untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk menjadi dasar penelitian selanjutnya supaya mereka yang ingin mengetahui seberapa baik kinerja keuangan di daerah mereka masing-masing selama 5 tahun ke belakang dan dapat memprediksi kinerja keuangan daerah mereka ke depan.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini yaitu periode penelitian terbatas pada tahun anggaran 2017-2021 dan rasio yang digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, Rasio pertumbuhan PAD dan rasio derajat desentralisasi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil dari analisis data dan pembahasan menggambarkan kinerja keuangan pemerintah kota Makassar jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja modal, rasio keserasian belanja operasi, rasio derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan PAD. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari BPKAD pemerintah kota Makassar. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis dan pembahasan yaitu:

1. Tingkat kemandirian di kota Makassar masuk dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif yang artinya kota Makassar sudah mampu dalam menjalankan otonomi daerahnya sendiri
2. Tingkat rasio efektivitas di kota Makassar sudah cukup baik melakukan Realisasi PAD yang telah dianggarkan
3. Tingkat rasio efisiensi di kota Makassar sudah efisien karena dalam melakukan suatu kegiatan pemerintahan dengan biaya sekecil mungkin dengan *ouput* yang baik dan memuaskan
4. Tingkat belanja rasio keserasian di kota Makassar terbagi menjadi dua yaitu rasio keserasian belanja modal dan rasio keserasian belanja operasi. Kota Makassar sudah baik dalam mengalokasikan pendanaannya baik untuk belanja operasional maupun belanja modal.
5. Tingkat rasio derajat desentralisasi masuk dalam kategori rendah, dengan kata lain pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan wewenang kepada kota

Makassar dalam hal pembangunan dan pelayanan publik dan pemerintah kota Makassar juga belum mampu dalam meningkatkan jumlah pendapatan PAD

6. Tingkat rasio pertumbuhan PAD di pemerintah kota Makassar mengalami kenaikan dan penurunan PAD tiap tahunnya.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis untuk pemerintah daerah kota Makassar yaitu:

1. Mengoptimalkan Potensi daerah yang ada sebagai penunjang PAD terutama dalam bidang pariwisata dan kelautan perikanan
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan pemasukan PAD
3. Meningkatkan fasilitas yang dapat memajukan sektor-sektor yang memiliki pengaruh dalam menunjang pendapatan seperti sektor perdagangan, industri barang dan jasa serta transportasi.
4. Melampirkan CALK pada situs resmi Kota Makassar atau Badan yang mengelola.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki Keterbatasan yaitu hanya terbatas pada periode 2017-2021 (5 tahun). Dalam menganalisis kinerja keuangan daerah, penulis menganalisis tentang APBD tetapi keterbatasan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) pemerintah kota Makassar.

Penulis memberikan saran yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya yaitu menambah jumlah tahun anggaran yaitu menjadi 10 tahun, menambahkan

rasio-rasio kinerja keuangan daerah dan menganalisis APBD lebih dalam sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.





## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah* . Yogyakarta: Pustaka AQ.
- Amin, N. (t.thn.). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis . *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul . *EBBANK* , 33-48.
- Holung, R. L., Kawung, G., & Tumangkeng, S. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *EMBA*, 869-877.
- Jumiati, Prasaja, A. S., & Anita, E. (2022). Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* .
- Kota Makassar. (2022, Desember 17 ). Diambil kembali dari Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Makassar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar)
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mailangkay, P. P., Murni, S., & Van Rate, P. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *EMBA*, 278-285.
- Maisyuri. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe. *JURNAL VISIONER & STRATEGIS*, 53-65.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Mashuri, & Nurjannah , D. (2020). Analisis Swot sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 97-112.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *EMBA*, 1521-1527.
- Murdiyanto , E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat .
- Nasution , D. A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia .
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara . *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.

- Pandjaitan, M., Tommy, P., & Untu, V. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *EMBA*, 1398-1407.
- Paramita, R. W., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kab. Lumajang: WIDYA GAMA PRESS.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. (2005, Desember 5). Diambil kembali dari peraturan bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2019, Maret 12). Diambil kembali dari peraturan bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Science Engineering & Humanoria* .
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suriono , Z. (2021 ). Analisis SWOT dalam Identifikasi Mutu Pendidikan . *ALACRITY : Journal Of Education* , 94- 103.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian*. Riau: UR Press Pekanbaru.
- Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. (2003, April 5). Diambil kembali dari peraturan bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (2004, Oktober 15). Diambil kembali dari peraturan bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* . (2014, September 15). diambil kembali dari peraturan bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (2014, Oktober 2). Diambil kembali dari peraturan.bpk: <https://peraturan.bpk.go.id>
- WEBSITE RESMI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**. (2022). Diambil kembali dari makassarkota: <https://makassarkota.go.id/>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal . *INDONESIAN TREASURY REVIEW* , 143-149.